

## BABI PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Aktivitas mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, menyajikan dalam bentuk angka, mencatat, meringkas dan melaporkan aktivitas transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan disebut dengan siklus akuntansi. Akuntansi merupakan sebuah proses yang berakhir pada perubahan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Tujuan laporan keuangan menurut SAK ETAP (2009:2) adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan akuntansi merupakan suatu sistematika yang dibuat oleh suatu organisasi atau badan usaha yang tujuannya untuk mencapai cita-cita perusahaan. Akuntansi juga sebagai pengendalian bagi organisasi, Berdasarkan rencana dan penerapan sistem akuntansi yang baik, dapat dikontrol atau dinilai jalannya kegiatan perusahaan.

Menurut SAK ETAP (2009:17) laporan keuangan entitas meliputi 1) neraca, neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. 2) Laporan laba rugi, laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. 3) Laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut. 4) Laporan arus kas, laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 5) catatan atas laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Pemerintah membuat program baru yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang bergerak pada bidang Jasa dimana terdapatnya Simpan Pinjam yang gunanya salah satu wujud dalam mengembangkan potensi dan peran Usaha Kecil dan Menengah Masyarakat. Selain itu program ini juga lebih memfokuskan bantuan kepada rakyat miskin serta perbaikan terhadap lingkungan sekitar. PNPM Mandiri Perdesaan/ kelurahan mendapat anggaran

dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang di salurkan ke rekening kolektif desa di Kecamatan.

Salah satu organisasi yang sangat memerlukan akuntansi adalah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Akuntansi berperan sangat penting dalam menjalankan operasi organisasi, dengan demikian apabila organisasi-organisasi menggunakan ilmu akuntansi dengan baik, maka dapat menyediakan informasi yang baik yang dapat diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Struktur organisasi pada Badan Kerjasama Antar Desa yaitu sebagai pelaksana pembangunan partisipatif tingkat kecamatan, juga terdiri dari UPK yaitu sebagai pelaksana program pengelola perguliran pelayanan usaha kelompok. Dan mempunyai kepengurusan organisasi berdasarkan keputusan Forum Musyawarah Antar Desa pada Tanggal 21 Juli 2008, susunan pengurus BKAD, UPK, Badan Pengawas UPK dan Tim Verifikasi sebagai berikut : 1. Ketua 2. Bendahara 3. Sekretaris dan Anggota.

BKAD menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaga yang dibentuk BKAD yang memuat peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. Segala keputusan untuk merubah Anggaran Dsar ini harus diputuskan melalui MAD dan sebelumnya BKAD membentuk Tim perumus.

UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Peranap dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan dikecamatan dan lembaga yang berfungsi bertanggung

jawab sebagai pelaksana .BKAD berkembang sebagai lembaga pengelola pembangunan partisipatif, pengelola kegiatan masyarakat, pengelola aset, dan sumber daya alam serta program/proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar desa.

Hubungan BKAD dengan UPK adalah hubungan mandataris dan pendelegasian pengelola kegiatan perguliran, pelaksanaan program dan pelayanan usaha kelompok, pengurus UPK bertanggungjawab kepada BKAD melalui forum MAD, Hubungan pengurus BKAD dan pengurus UPK sebagai mitra kerja dalam proses pelaksanaan kegiatan pengelola kegiatan, dan setiap lembaga operasional harus mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilengkapi dengan penjelasan pelaksanaannya.

Neraca kegiatan Microfinance UPK Tiga Lorong di kecamatan peranakabupaten Indragiri Hulu secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok dalam mengelola dana bergulir yang bertujuan untuk : mempermudah akses permodalan dengan pinjaman tanpa jaminan dan mempunyai aturan sendiri. Masyarakat langsung dilibatkan dan *botton up planning*, pemberdayaan perempuan dengan penyelenggaraan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) dan simpan pinjam khusus perempuan (SPP), keberlanjutan dengan memperkuat kelembagaan dengan program microfinance.

Modal dari Dana dari KPPN PPK I Rp. 3.000.000.000,-, Dana dari KPKN PPK II Rp. 1.060.000.000,-, dan Dana dari KPKN PNPM Rp. 4.390.000.000,- (Lampiran 1) didapat dari transfer KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) yang dilakukan melalui UPK. Transfer dana integrasi Rp. 3.199.709.100,-

(Lampiran 1) didapat dari pemerintah provinsi Riau yang sumbernya dari APBN dan APBD. Dana cost sharing Rp. 3.810.000.000,- (Lampiran 1) merupakan pembiayaan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). Besarnya cost sharing disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Dana hibah pihak III Rp. 126.012.400,- dan dana hibah dari pemda Rp. 40.000.000,- (Lampiran 1) merupakan dana dari APBN dan APBD untuk pembangunan kantor UPK Tiga Lorong. Surplus ditahan Rp. 854.916.339,- (Lampiran 1) didapat dari hasil operasional yang diperoleh UPK pada tahun lalu. Surplus berjalan Rp. 132.501.339,- (Lampiran 1) didapat dari akumulasi hasil operasional yang diperoleh UPK yang ada pada tahun sekarang. Metode yang digunakan dalam pengakuan pendapatan dan beban yaitu, pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima, sedangkan beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya.

Alokasi Desa Serah Terima merupakan aset fisik milik UPK Tiga Lorong. Alokasi Desa Serah Terima yang terdiri dari Prasarana Rp. 12.505.281.500,- (Lampiran 1) yang akan digunakan untuk pembangunan seperti rabat beton, pos kamling, drainase, balai desa dll yang setelah pembangunan selesai menjadi aset UPK Tiga Lorong dan diserahkan pemanfaatannya kepada desa. UPK Tiga Lorong tidak membuat penyusutan terhadap prasarana tersebut.

Dana Pendidikan Rp. 126.000.000,- (Lampiran 1) yang akan digunakan untuk kegiatan pelatihan menjahit, beasiswa dll merupakan dana program pengembangan pelatihan untuk tiap-tiap desa.

Operasional Desa Rp. 451.463.890,- (Lampiran 1) merupakan dana yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan dalam pembangunan jembatan. Dana

ini merupakan dari APBN dan APBD yang telah disalurkan kedesa-desa sesuai dengan kegiatan yang sudah diserahkan terima kedesa.

Proses atau siklus akuntansi yang dimulai dengan menganalisa dan membuat jurnal untuk transaksi-transaksi dan diakhiri dengan posting ayat jurnal penutup memiliki langkah-langkah sebagai berikut diantaranya: menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal (jurnal umum dan jurnal khusus), posting transaksi tersebut ke buku besar, menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan, menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian, menyiapkan kertas kerja akhir periode, membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar, menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan, menyiapkan laporan keuangan, membuat ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar, dan menyiapkan daftar saldo setelah penutup.

Usaha simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Usaha simpan pinjam berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya (Agus Suhaili).

Untuk kegiatan penyaluran dana BLM MPd dan Integrasi, UPK Peranap sudah menyalurkan dana sebanyak Rp. 1.862.002.200,- ke 9 (sembilan) desa/kelurahan, tentu saja dengan memaksimalkan prosedur dan aparat-aparat organisasi desa yang berwenang, agar dana benar-benar tersalurkan dan tujuan dari penyaluran dana tercapai tepat ke masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal

pengelolaan dana bergulir, di tahun 2014, UPK sudah menyalurkan pinjaman kepada kelompok SPP, yaitu sebanyak 36 kelompok, dengan jumlah pemanfaat 341 orang, dan total dana yang digulirkan adalah Rp. 1.623.000.000,-. Walaupun tidak sebanyak dana yang digulirkan pada tahun sebelumnya tetapi perguliran dana ini cukup memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan.

Proses akuntansi yang dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di mulai dari mencatat transaksi ke dalam buku kas harian manual UPK dan buku kas harian manual UPK berdasarkan bukti kwitansi, kemudian menyusun kas harian UPK, daftar uang masuk UPK, daftar uang keluar UPK, kas harian P2SPP, daftar uang masuk P2SPP, daftar uang keluar SPP, Laporan perkembangan pinjaman SPP, neraca percobaan UPK-SPP, neraca UPK-SPP, dan laporan laba rugi. Tetapi pada buku kas harian BKAD tidak memisahkan antara transaksi pemasukan dan transaksi pengeluaran (Lampiran 1).

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tiga Lorong di kecamatan Peranap dalam proses pencatatan transaksi tidak membua t jurnal. Pengakuan pendapatan yang diterapkan dalam UPK-SPP ini dengan menggunakan *accrual basis*, yaitu pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi. Demikian juga dengan pengakuan beban, diakui dengan menggunakan *accrual basis*, dengan menggunakan *accrual basis* yang berarti UPK-SPP mengakui beban pada saat terjadinya transaksi meskipun belum berpengaruh pada kas.

Aktiva tetap UPK berupa inventaris dengan saldo Rp. 73.548.905, perhitungan penyusutan dilakukan dengan cara membagi harga perolehan dengan umur ekonomis suatu inventaris.

Pihak UPK-SPP sudah menyusun Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas tetapi UPK-SPP Tiga Lorong di Kecamatan Peranap belum menyusun Laporan Perubahan Ekuitas dan membuat catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul :

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD) UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) TIGA LORONG DI KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengajukan rumusan masalah berikut ini :

Bagaimana penerapan akuntansi pada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tiga Lorong di Kecamatan Peranap Indragiri Hulu telah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pada BKAD sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum dalam laporan keuangannya.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menambah wawasan penulis dalam penerapan akuntansi pada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
- b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tentang penerapan akuntansi.
- c. Untuk bahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian terhadap masalah yang sama.

### D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjadi acuan pemahaman teoritis dalam penelitian ini, review penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis.
- BAB III : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yaitu lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.
- BAB IV : Dalam bab ini mengemukakan gambaran umum daerah penelitian kecamatan peranap, dan sejarah serta Visi dan Misi Tiga Lorong Kecamatan Peranap.

- BAB V : Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.
- BAB VI : Pada bab ini penulis akan menutup dengan membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran yang dirasakan perlu sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau